

Penguatan Pembangunan Pertanian sebagai Landasan Pembangunan Perekonomian Indonesia

Payaman Simanjuntak

The agricultural sector remains playing an important role in the Indonesian economy, in terms of contributing to Gross National Product and to employment generation. In year 2000, agricultural sector contributed 16.7% of the GDP and absorbed 45.3% of the labour force. However, Indonesia has not been able to develop agricultural sector to be self-sufficient for agricultural products. Indonesia is still dependent on import of rice, several kinds of fruits, meats and others. The other problem that Indonesia is facing today and in the future is that almost half of the farmers own less than 0.5 Ha of land, from which they hardly to have decent income. Therefore, the development of agro-industries and household businesses is crucially important in order to increase the value of the agricultural products, to stimulate exports of the agricultural products, and to increase the households income.

Kata-kata kunci: pertanian, tenaga kerja dan sumber daya manusia

Sektor pertanian masih dominan dalam perekonomian Indonesia, baik dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional maupun, dan terutama dalam penyerapan tenagakerja. Demikian juga sektor pertanian terutama perkebunan dan kehutanan merupakan sumber utama bahan baku bagi industri manufaktur atau industri pengolahan. Hal ini sudah disadari sejak awal rangkaian pembangunan jangka panjang pada masa pemerintahan Orde Baru.

Strategi Pembangunan Lima Tahun (Pelita) Pertama dan Kedua adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pembangunan sektor pertanian yang kuat dan tangguh. Strategi Pembangunan Lima Tahun berikutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang

didukung oleh sektor pertanian yang tangguh.

Data tahun 2000 masih menunjukkan peranan penting sektor pertanian dalam menyerap 45,3 persen angkatan kerja dan dalam memberikan kontribusi 16,7 persen terhadap pendapatan nasional. Posisi penting sektor pertanian ini masih akan tetap bertahan paling sedikit hingga 10-15 tahun yang akan datang. Masalah utama yang dihadapi Indonesia sekarang ini adalah bahwa Indonesia sebagai negara pertanian masih tetap tergantung pada impor hasil-hasil pertanian. Hampir setengah petani memiliki kurang dari 0.5 Ha lahan pertanian, dan penghasilan para petani umumnya rendah.

Kondisi Sektor Pertanian

Sebagaimana dikemukakan di atas, peranan sektor pertanian masih sangat

penting dalam perekonomian Indonesia, walaupun secara proporsional menurun. Sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 1, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional atau produk domestik bruto, turun dari 44,8% pada tahun 1971 menjadi hanya 19,4% pada tahun 1990 dan turun lagi menjadi 16,7% pada tahun 2000. Demikian juga jumlah pekerja yang diserap secara proporsional turun dari 67,3% pada tahun 1971 menjadi 50,4% tahun 1990 dan menjadi hanya 45,3% pada tahun 2000.

Walaupun jumlah pekerja di sektor pertanian secara proporsional terus menurun, jumlah keluarga yang mengolah

lahan pertanian terus bertambah dari 14,4 juta keluarga pada tahun 1973, menjadi 15,9 juta keluarga tahun 1983 dan menjadi sekitar 18 juta keluarga pada tahun 1993. (Lihat Tabel 2). Masalah utama di sektor pertanian adalah pemilikan lahan yang sangat terbatas. Hampir 50 persen keluarga petani memiliki dan mengolah kurang dari 0,5 Ha lahan pertanian. Hasil yang diperoleh dari lahan terbatas seperti itu tidak cukup guna memenuhi kebutuhan keluarga yang pada umumnya lebih dari 3 orang per keluarga.

Masalah kedua adalah luas lahan pertanian terus berkurang karena tergusur oleh pemukiman, bangunan dan industri,

Tabel 1 Produk Domestik Bruto dan Pekerja Menurut Sektor, 1971-2000 (Persen)

SEKTOR	PRODUK DOMESTIK BRUTO							PEKERJA						
	1971	1980	1985	1990	1995	1997	2000	1971	1980	1985	1990	1995	1997	2000
Pertanian	44.8	24.8	23.7	19.4	14.8	16.1	16.7	67.3	56.3	54.7	50.4	44.0	40.7	45.3
Pertambangan	8.0	25.7	16.3	15.2	8.8	9.2	9.9	0.2	0.3	0.7	1.0	0.8	1.0	0.8
Industri	8.4	11.6	14.1	19.4	25.1	24.0	26.4	6.8	9.1	9.3	11.5	12.6	12.9	13.0
Listrik	0.5	0.5	0.9	0.4	1.2	1.1	1.6	0.1	0.9	0.9	0.2	0.3	0.3	0.2
Bangunan	3.5	5.6	5.4	5.8	8.1	7.6	6.0	1.7	3.2	3.4	4.1	4.7	4.9	3.9
Komunikasi	4.4	4.3	6.6	5.5	7.4	7.1	7.4	2.4	2.9	3.1	3.7	4.3	4.8	5.0
Jasa-jasa	30.4	27.5	33.0	34.6	34.1	34.9	32.4	21.5	27.6	28.7	29.1	33.3	35.4	32.2
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2001, *Profil Sumberdaya Manusia Indonesia*

Tabel 2 Jumlah Keluarga Menurut Luas Tanah Pertanian yang Dikuasai, 1973, 1983, 1993

Luas Lahan (Ha)	1973		1983		1993	
	X 1000	%	X 1000	%	X 1000	%
< 0,50	6.560,8	45,6	6.495,1	40,8	8.726,4	48,5
0,50 - 1,999	6.151,9	42,8	7.153,3	44,9	7.122,0	39,6
2,00	1.660,8	11,6	2.279,0	14,3	2.130,0	11,9
Total	14.373,5	100,0	15.927,4	100,0	17.978,4	100,0

Sumber : Sensus Pertanian Tahun 1973, 1983, 1993

pembukaan jalan raya dan toll, serta akibat erosi. Luas lahan pertanian berkurang dari 16,7 juta Ha tahun 1983 menjadi hanya 13,4 juta Ha pada tahun 1993. Dengan demikian luas tanah rata-rata yang diolah juga berkurang dari 1,05 Ha per keluarga tahun 1983 menjadi hanya 0,86 Ha per keluarga tahun 1993. Akibatnya penghasilan tiap keluarga juga pada umumnya berkurang.

Ketiga, nilai tukar hasil-hasil pertanian terhadap hasil-hasil industri dan jasa pada umumnya terus menurun. Akibatnya nilai hasil yang dinikmati para petani relatif kecil. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1, sekitar 45 persen penduduk bekerja dan hidup dari sektor pertanian dalam tahun 2000 menikmati hanya 16,7 persen pendapatan nasional.

Hasil-hasil pertanian pada umumnya tergantung pada musim. Pada musim panen, jumlah penyediaan atau *supply* besar sehingga harga cenderung turun. Banyak hasil pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan ikan yang tidak tahan disimpan lama, sehingga pada musim panen sering harus dijual dengan sangat murah daripada busuk dan dibuang percuma. Dengan pengembangan agro-industri, daya tahan hasil-hasil pertanian tersebut dapat diperpanjang dan nilai tambahnya dapat ditingkatkan. Demikian juga keluarga yang memiliki dan mengolah lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha, memerlukan kegiatan dan sumber penghasilan tambahan, supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak.

Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia
Kualitas sumberdaya manusia Indonesia dewasa ini pada umumnya masih rendah, baik untuk tingkat manajemen maupun untuk tingkat pelaksana. Demikian juga kondisi dunia kerja masih menghadapi tantangan besar dalam pemanfaatan

teknologi maju dan peluang perdagangan internasional. Sesuai dengan perhitungan UNDP, Indeks Kualitas SDM Indonesia dalam tahun 2001 hanya mencapai 0,682 atau menempati urutan ke-112 dari 175 negara di dunia. Indeks ini mencakup bobot yang diberikan terhadap harapan hidup rata-rata penduduk, tingkat pendidikan dan produk domestik bruto atau tingkat konsumsi masyarakat.

Penduduk dan angkatan kerja Indonesia bertumbuh dengan cepat walaupun sudah terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 1,98 persen per tahun dalam periode 1980-1990 menjadi 1,70 persen per tahun dalam periode 1990-1995, dan 1,57 per tahun dalam kurun waktu 1995-2000. Dengan demikian jumlah penduduk diperkirakan meningkat dari sekitar 195 juta dalam tahun 1995 menjadi sekitar 225,7 juta dalam tahun 2005. Demikian juga angkatan kerja akan meningkat dari 84,2 juta menjadi 113,6 juta dalam periode yang sama. Lihat Tabel 3.

Tingkat pendidikan penduduk dan angkatan kerja Indonesia pada umumnya masih rendah. Pada tahun 2000, hampir 70 persen angkatan kerja yang berpendidikan hanya maksimum Sekolah Dasar. Kebanyakan mereka bekerja di sektor pertanian. Angkatan kerja yang berpendidikan SLTA atau lebih, belum mencapai 25 persen. Lihat Tabel 4.

Tingkat pengangguran terbuka terus meningkat mulai dari 1,72 persen pada tahun 1980 menjadi 3,17 persen pada tahun 1990 dan menjadi 7,24 persen pada tahun 1995. Pengangguran di kalangan tenaga terdidik terutama lulusan SLTA dan perguruan tinggi, cukup memprihatinkan yaitu 15,77 persen dan 12,36 persen. Lihat Tabel 5. Di desa-desa dan di sektor pertanian, tingkat pengangguran terbuka memang rendah, namun tingkat setengah

Tabel 3 Penduduk dan Angkatan Kerja Indonesia Tahun 1995 - 2005

Penduduk dan Angkatan kerja	1995 a)	2000 b)	2005 b)
Penduduk	144.755	210.486	225.748
Laki-laki	96.930	104.752	112.352
Perempuan	97.825	105.734	113.396
Penduduk berumur 15 tahun atau lebih	128.806	148.485	162.932
Laki-laki	63.287	73.158	80.396
Perempuan	65.519	75.363	82.536
Angkatan Kerja	84.230	100.606	113.613
Laki-laki	53.506	60.836	67.954
Perempuan	30.724	39.770	45.659

Sumber: a) *Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995* b) *Proyeksi Penduduk Indonesia per Propinsi 1995-2005*. Jakarta : BPS, 1998. *Proeksi Angkatan Kerja Indonesia 1998-2005*. Jakarta : BPS, 1998.

Tabel 4 Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Indonesia Tahun 1990 - 2000

Tingkat Pendidikan	1990		1995		2000	
	X 1.000	%	X 1.000	%	X 1.000	%
Tidak Tamat SD	31.914,4	44,5	29.126,6	34,6	21.751,0	22,7
Tamat SD	22.243,1	31,0	27.339,7	32,4	35.507,3	37,1
Tamat SLTP	6.760,8	9,4	10.015,0	11,9	15.363,0	16,1
Tamat SLTA	9.006,2	12,6	14.476,1	17,2	18.590,9	19,4
Diploma	886,2	1,3	1.485,8	1,8	2.144,0	2,3
Sarjana	866,1	1,2	1.786,9	2,1	2.294,7	2,4
Jumlah	71.676,8	100,0	84.230,1	100,0	95.650,9	100,0

Sumber : Sensus Penduduk (Sensus) 1990. Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 1990. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2000.

penganggur sangat tinggi. Tantangan ke depan di sektor pertanian adalah memberdayakan setengah penganggur dan memperkenalkan usaha-usaha tambahan sebagai pelengkap.

Kondisi Perekonomian Indonesia dan Kecenderungan Dunia

Dalam globalisasi dunia sekarang ini, saling ketergantungan satu negara dengan negara lain menjadi semakin besar. Amerika Serikat dan Uni Eropa sangat mempengaruhi kondisi politik dan perekonomian

dunia. Di bidang ekonomi, Amerika Serikat dan Uni Eropa mengkonsumsi lebih dari 50 persen dari energi dan konsumsi dunia, menyerap lebih dari 70 persen transaksi perdagangan internasional dan memiliki saham lebih dari 70 persen investasi multinasional di luar negeri. Perubahan dan masalah yang terjadi di negara-negara maju tersebut akan mempunyai dampak langsung dan tidak langsung pada perekonomian negara berkembang.

Dalam kurun waktu 1950-1970 laju pertumbuhan perekonomian Amerika

Serikat dan Masyarakat Eropa cukup tinggi. Tingkat pengangguran di negara-negara tersebut cukup rendah. Kondisi tersebut telah mendorong perekonomian negara-negara berkembang dengan laju pertumbuhan yang tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah. Sebaliknya, krisis perekonomian di Amerika Serikat sejak awal 1970-an dan tingkat bunga yang tinggi sejak awal tahun 1980-an, telah ikut mendorong terjadinya krisis di negara-negara berkembang seperti penurunan laju

minyak menanamkan dolarnya membeli saham di negara-negara maju.

Kedua, Amerika Serikat dan Uni Eropa terus-menerus dilanda tekanan dan tuntutan Serikat Pekerja. Sebab itu para pengusaha di negara-negara tersebut bukan saja terus-menerus berupaya menciptakan teknologi hemat tenaga kerja (*labour-saving technology*), akan tetapi juga mengalihkan sebagian investasinya ke negara-negara berkembang, terutama ke kawasan Asia yang dianggap relatif stabil. Akhir-akhir ini Amerika Serikat

Tabel 5 Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, 1980 - 2000 (Persen)

Tingkat Pendidikan	1980	1990	1995	2000
Laki-laki	1,43	2,77	5,58	5,68
Tidak Tamat SD	0,96	1,16	2,24	1,10
Tamat SD	1,50	2,09	4,24	3,28
Tamat SLTP	2,49	4,21	7,41	7,88
Tamat SLTA	3,62	7,63	11,71	11,44
Perguruan Tinggi	1,32	5,21	8,99	8,00
Perempuan	2,31	3,88	10,11	6,71
Tidak Tamat SD	1,37	1,53	3,55	0,93
Tamat SD	2,68	3,61	9,27	3,66
Tamat SLTP	4,50	7,73	16,99	11,05
Tamat SLTA	5,70	13,48	24,70	18,67
Perguruan Tinggi	3,75	10,24	18,56	14,67
Laki dan Perempuan	1,72	3,17	7,24	6,08
Tidak Tamat SD	1,31	1,32	2,82	1,02
Tamat SD	1,79	2,58	5,95	3,43
Tamat SLTP	2,84	5,12	10,17	8,90

Sumber : Sensus Penduduk Tahun 1980 Sensus Penduduk Tahun 1990; Survei Penduduk Antar Sensus 1995; Survei Angkatan Kerja Nasional 2000

pertumbuhan, tingkat pengangguran yang tinggi dan krisis utang.

Hingga pertengahan dekade 1990-an, Amerika Serikat dan negara-negara anggota Uni Eropa menghadapi masalah besar. **Pertama**, krisis minyak awal tahun 1970-an, telah memaksa negara-negara tersebut melakukan strukturisasi teknologi

penghemat energi (*energy-saving technology*) tetapi yang sekaligus menjadi padat modal (*capital intensive*) sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja (*labour-saving technology*). Akibatnya negara-negara tersebut menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Sementara itu, negara-negara Arab penghasil

dan beberapa negara sekutunya di Eropa mengalami tekanan anggaran defisit akibat perang di Irak. Akibatnya, pertumbuhan di negara-negara maju tersebut sangat rendah bahkan di beberapa negara negatif.

Sementara itu laju pertumbuhan perekonomian sebelum krisis di Asia terus meningkat. Jepang mampu menerobos seluruh pasar dunia dengan kemampuan mengeksploiter sumberdaya alam di Asia, menciptakan teknologi unggul dan cocok menurut kondisi masing-masing negara, serta sistem manajemen yang harmonis dan simpatik. Perekonomian Singapura, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan, terus maju dengan pesat dengan menerima relokasi industri negara maju yang sekaligus memperoleh akses pasar global, didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdisiplin kerja tinggi. Malaysia, Thailand dan Indonesia telah dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia didukung oleh arus modal dan investasi dari luar negeri. Demikian juga Vietnam, Cina dan India telah mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dengan kesediaan menampung relokasi industri negara-negara maju. Sejak tahun 2001, Cina masuk WTO. Sejak itu pula barang-barang produksi Cina membanjiri seluruh pasar dunia termasuk Indonesia, dengan menawarkan harga sekitar 20 persen lebih rendah dari produksi lokal.

Ketimpangan pertumbuhan ini telah menimbulkan kecemburuan negara-negara Amerika dan Uni Eropa. Untuk lebih membatasi penetrasi barang-barang produksi Asia ke negara-negara maju, Amerika Serikat dan uni Eropa mulai memaksakan aturan-aturan dagang melalui GATT dan Uruguay Round yang kemudian dilanjutkan melalui World Trade Organization, WTO. Di satu pihak dipaksakan penghapusan atau pengurangan pajak impor

supaya barang-barang produksi negara maju lebih bebas memasuki pasar di negara-negara berkembang. Di lain pihak, negara-negara maju tersebut memaksakan kondisi-kondisi tertentu bagi produk negara berkembang yang akan memasuki pasar negara maju. Kondisi tersebut antara lain menyangkut hak paten, aspek lingkungan, kondisi ketenagakerjaan dan hak azasi manusia.

Semua negara mengakui bahwa penghapusan atau pengurangan pajak impor sebagaimana disepakati melalui GATT dan Uruguay Round akan dapat meningkatkan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. Satu studi berkesimpulan bahwa pengurangan pajak impor tersebut dapat meningkatkan 20 persen volume perdagangan internasional dan 5 persen rata-rata laju pertumbuhan seluruh dunia (ILO, 1995, hal. 7). Yang menghantui Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa adalah bahwa sebagian besar hasil tersebut akan dinikmati oleh negara-negara berkembang. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa perdagangan negara-negara maju dan negara-negara industri baru (*newly-industrialized countries*) adalah seimbang. Negara industri baru tersebut mengimpor mesin-mesin, teknologi dan produk lainnya dari negara maju, yang pada gilirannya menciptakan kesempatan kerja domestik mereka. Demikian juga hingga tahun 1992, perusahaan multinasional diperkirakan telah menciptakan sekitar 73 juta kesempatan kerja baru di dunia, diantaranya hanya sekitar 12 juta di negara-negara berkembang. Sekitar 61 juta lainnya diciptakan justru di negara maju. (ILO, 1995, hal. 2).

Berdasarkan kekhawatiran tersebut negara-negara maju mencoba membatasi ekspor negara berkembang terutama dari

Asia dengan mencoba membuat persyaratan baru dalam perdagangan yang disebut "social clause". Dengan "social clause" tersebut negara maju dimungkinkan menolak ekspor negara berkembang bila mereka beranggapan bahwa hak-hak pekerja dalam memproduksi barang ekspor tersebut kurang diperhatikan seperti hak berorganisasi dan upah yang memadai. Bila *social clause* tersebut dipaksakan, maka perekonomian dunia akan menghadapi masalah yang lebih sulit.

Sebagaimana dikemukakan di atas, kondisi perekonomian Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian. Proporsi pendapatan nasional dari sektor pertanian turun dari 24,8 persen pada tahun 1980 menjadi 16,7 persen pada tahun 2000, sementara dari sektor industri naik dari 11,6 persen menjadi 26,4 persen, serta dari sektor jasa-jasa naik dari 31,8 persen menjadi 39,8 persen dalam periode yang sama. Demikian juga proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian turun dari 56,3 persen pada tahun 1980 menjadi 45,3 persen pada tahun 2000, sementara di sektor industri naik sedikit dari 9,1 persen menjadi 13 persen dan di sektor jasa-jasa naik dari 30,7 persen menjadi 37,2 persen dalam periode yang sama. Lihat Tabel 1.

Krisis moneter dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan betapa lemahnya struktur perekonomian Indonesia dan betapa rendahnya kualitas manajerial Indonesia. Sektor industri dan sektor bangunan kita ternyata masih sangat tergantung pada modal luar negeri dan komponen impor. Demikian juga banyak pengusaha yang sangat tergantung pada penyediaan fasilitas Pemerintah, dan karena fasilitas itu berkurang atau tidak tersedia lagi, bisnis menjadi otomatis tak berkembang. Pemutusan hubungan kerja terus berlanjut, jumlah pengangguran membengkak.

Indikator ekonomi makro memang menggembirakan. Tingkat inflasi relatif rendah, tingkat bunga juga rendah. Namun, karena Pemerintah masih tetap mengandalkan teori ekonomi konvensional, indikator makro tersebut belum mampu menggerakkan sektor riil, mengundang investor, menanggulangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah belum mampu menghilangkan hambatan birokratis dan korupsi. Pemerintah belum mempunyai strategi penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan akar permasalahan dan kondisi yang dihadapi. Semua ini karena keterbatasan kemampuan dan profesionalisme para pembantu Presiden, dan secara umum karena rendahnya kualitas SDM kita.

Strategi Pembangunan Sektor Pertanian

Tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam tahun-tahun mendatang adalah sebagai negara yang berbasis pertanian perlu mengolah sektor ini dengan sebaik-baiknya sehingga semua kebutuhan dalam negeri dapat diproduksi sendiri dalam negeri, tidak tergantung pada impor. Bahkan sebagai negara yang berbasis sektor pertanian, Indonesia patut menjadi pengeksport utama hasil-hasil pertanian, termasuk ekspor hasil pertanian yang sudah diolah.

Kedua, baik dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertanian, maupun dalam rangka mendorong ekspor hasil-hasil pertanian, perlu pengembangan agro-industri dengan melibatkan langsung para petani, terutama petani yang memiliki lahan pertanian kurang dari 0,50 Ha per keluarga. Dengan demikian, mereka mempunyai sumber penghasilan tambahan,

dan hasil-hasil pertanian akan lebih mudah diproses untuk diekspor.

Ketiga, sekitar 8,7 juta keluarga yang memiliki lahan pertanian kurang dari 0,50 Ha per keluarga pada umumnya tergolong setengah penganggur dan berpenghasilan sangat terbatas. Oleh sebab itu, perlu mengembangkan industri rumah tangga atau kerajinan tangan, sebagai sumber penghasilan tambahan. Untuk itu perlu mobilisasi tenaga-tenaga muda yang berdedikasi dan dipersiapkan memberikan motivasi, bimbingan dan penyuluhan bagi para petani untuk mengembangkan usaha-usaha keluarga tersebut.

Keempat, masalah yang sering dihadapi oleh mereka yang telah berhasil mengembangkan usaha keluarga adalah memasarkan hasil-hasilnya. Untuk itu perlu memberdayakan Koperasi-Koperasi Unit Desa, baik untuk mengambil inisiatif mengembangkan usaha pengolahan hasil-hasil pertanian, maupun untuk menampung dan memasarkan hasil-hasil usaha keluarga.

Akhirnya, perlu pengembangan sumberdaya manusia untuk mempersiapkan para tenaga-tenaga motivator, maupun untuk membangun agro-industri, demikian juga tenaga-tenaga berkualitas sebagai pengelola Koperasi. ●

Daftar Pustaka

- Champy, James, 1996. *Reengineering Management*. New York : Harper Business.
- Hammer, Michael and James Champy, 1994, *Reengineering the Corporation*. New York : Harper Business.
- International Labour Office, 1995. *World Employment 1995*. Geneva : ILO.
- Naisbitt, John, 1994. *Global Paradox*. St. Leonards, Australia : Allen & Unwin.
- Osborne, David and Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government*. New York :A Plume Book.
- Sengenbergen, Werner and Duncan Campbell (Eds), 1994. *International Labour Standards and Economic Interdependence*. Geneva : ILO.
- Simanjuntak, Payaman, (Penyunting), 1983. *Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Pembangunan Pertanian*. Jakarta : Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).
- , *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. 1998, Jakarta : Lembaga Penerbit, FE-UI.
- , "Manpower Problems and Policies" dalam *Indonesia Assessment 1993*, disunting oleh Chris Manning dan Joan Hardjono. Canberra : Australian National University.
- , *Iptek dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Makalah ilmiah disampaikan pada Seminar Iptek dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam rangka Dies Natalis ke-42 dan Wisuda Sarjana ke-37 Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 21 September 1994.
- , *The Social Dimensions of the Liberalization of World Trade*. Paper presented at the 262nd Session of the Governing Body, International Labour Organization, Geneva, 16 March - 7 April 1995.

Topik: In Memoriam Ace Partadiredja Kearah Pemikiran Ekonomi Kelembagaan

—————, "Globalisasi dan
Sumberdaya Manusia",
Pengembangan Perbankan, No. 57,
Januari - Pebruari 1996. hal. 42 - 51.

United Nations Development Programme,
2004. *Human Development Report
2004*. New York : UNDP.

Wieczorek, Jaroslaw, *Sectoral Trends in
World Employment*. Geneva : ILO,
1995.

□□□